

**J. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<b>1. Pendaftaran Penduduk</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi. 2. —	1. Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota. 2. —
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala nasional.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional. 2. —	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi. 2. —	1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pendaftaran perubahan alamat;</li> <li>c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia;</li> <li>d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara;</li> <li>e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara;</li> <li>f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara;</li> <li>g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan;</li> <li>h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk;</li> <li>i. Penatausahaan pendaftaran penduduk.</li> </ul>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala nasional.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten/kota.
<b>2. Pencatatan Sipil</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi. 2. —	1. Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten/kota. 2. —
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala nasional.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. —	2. —	2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten/kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencatatan kelahiran;</li> <li>b. Pencatatan lahir mati;</li> <li>c. Pencatatan perkawinan;</li> <li>d. Pencatatan perceraian;</li> <li>e. Pencatatan kematian;</li> <li>f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak;</li> <li>g. Pencatatan perubahan nama;</li> <li>h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan;</li> <li>i. Pencatatan peristiwa penting lainnya;</li> <li>j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta;</li> <li>k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil;</li> <li>l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.</li> </ul>
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala nasional.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten/kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala nasional.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.	1. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.
<b>3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi. 2. —	1. Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota. 2. —
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.
	3. Penyelenggaraan	1. Koordinasi penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data.</p> <p>3. —</p> <p>4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala nasional.</p> <p>5. Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak.</p> <p>6.a. Pembangunan bank data kependudukan nasional.</p> <p>b.—</p> <p>7. —</p>	<p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi.</p> <p>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data di provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi.</p> <p>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi.</p> <p>6.a. Pembangunan bank data kependudukan provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>7. —</p>	<p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk.</p> <p>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten/kota.</p> <p>6.a. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten/kota.</p> <p>b. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</p> <p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala nasional. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan nasional. b.—	8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan provinsi. b.—	administrasi kependudukan. 8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 9.a. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kabupaten/ kota. b. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.
	6. Pengawasan	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala nasional.	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten/kota.

<b>4. Perkembangan Kependudukan</b>	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala nasional.</li> <li>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi.</li> <li>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten/ kota.</li> </ol>
	2. Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. —</li> </ol>



	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.</li><li>2. —</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.</li><li>2. —</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.</li><li>2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</li></ol>
--	--------------------	--	--	--

		<p>3. —</p> <p>4. —</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.</p>	<p>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.</p>
--	--	-------------------------	--	---

	<p>4. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.</p>	<p>1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.</p>	<p>1. Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.</p>
--	-----------------------------------	--	--	--

	5. Pembinaan dan Fasilitasi	1. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan dan penyerasian penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.	1. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. —
	6. Pengawasan	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala nasional.	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten/kota.
<b>5. Perencanaan Kependudukan</b>	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala nasional. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan.	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi. 2. —	1. Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten/kota. 2. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Sosialisasi	1. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala nasional.	1. Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. —
	3. Penyelenggaraan	<p>1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala nasional.</p> <p>b.—</p> <p>2. Penetapan dan pengembangan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala nasional.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan</p>	<p>1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala provinsi.</p> <p>b.—</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi,</p>	<p>1.a. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala nasional.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala nasional.</p>	<p>dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala provinsi.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala provinsi.</p>	<p>dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>5. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten/kota.</p>
	<p>4. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala nasional.</p>	<p>1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.</p>	<p>1. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	5. Pembinaan	1. Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan skala nasional.	1. Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. —
	6. Pengawasan	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan skala nasional.	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan skala provinsi.	1. Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyesuaian kebijakan kependudukan skala kabupaten/kota.